



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

## Media Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung



### **PENYERAHAN LHP LKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (AUDITED) OLEH PIMPINAN V BPK RI**

Bandar Lampung – Pada tanggal 8 Mei 2023 bertempat di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Audited). Penyerahan LHP dilakukan melalui Rapat Paripurna Istimewa dan dihadiri oleh Anggota V selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Ahmadi Noor Supit dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Yusnadewi, beserta pejabat struktural dan fungsional.

Pimpinan KN V BPK RI menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay dan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH) atas Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Penekanan Suatu Hal tersebut terkait Catatan atas Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Utang tersebut merupakan bagi hasil triwulan II, III dan IV Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara baik agar dapat menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota secara tepat waktu dan juga untuk menghindari terjadinya defisit anggaran yang belum dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Lampung, dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

## Daftar Isi

### Halaman 1

- PENYERAHAN LHP LKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (AUDITED) OLEH PIMPINAN V BPK RI

### Halaman 2

- PELAKSANAAN SOSIALISASI OPTIMALISASI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
- PELAKSANAAN FGD OLEH DITAMA BINBANGKUM

### Halaman 3

- BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG MENERIMA KUNJUNGAN DARI KANWIL DJPB PROVINSI LAMPUNG
- BPK BERBAGI: PEMBERIAN SANTUNAN OLEH MASJID BAITUL HASIB BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

### Halaman 4

- POJOK KULINER LAMPUNG

### Halaman 5

- GALERI FOTO

### Halaman 6

- TIM REDAKSI

## PELAKSANAAN SOSIALISASI OPTIMALISASI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG



Bandar Lampung – Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan Ditama Binbangkum BPK RI dengan tema “Optimalisasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan di Wilayah Provinsi Lampung” yang dihadiri oleh seluruh entitas BPK Perwakilan Provinsi Lampung di ruang auditorium lantai tiga gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Acara dimulai dari kata sambutan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Yusnadewi. Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa penyelesaian tuntutan perbendaharaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan agar masing-masing entitas dapat melakukan optimalisasi dari penyelesaian kerugian daerah terutama tuntutan perbendaharaan yang ada pada wilayahnya. Bertindak sebagai moderator dalam sosialisasi ini adalah Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Lukman Hakim dan Kepala Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah Ditama Binbangkum, Handrias Haryotomo sebagai narasumber. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD beserta jajaran pada entitas se-Provinsi Lampung.

## PELAKSANAAN FGD OLEH DITAMA BINBANGKUM PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



Bandar Lampung – BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dari Ditama Binbangkum BPK RI dengan tema “Mitigasi Risiko Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPK serta Lesson Learned atas Gugatan yang Diajukan Kepada BPK” pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di ruang auditorium lantai tiga gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Yusnadewi, yang dalam kesempatan ini menyampaikan harapan agar FGD yang dilaksanakan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Acara dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara, Dadan Hendrawan, sebagai moderator dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber dari Ditama Binbangkum BPK RI yaitu Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum, Supriyonohadi, dan Kasubdit Bantuan Hukum, Dherys Virgantara. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

## BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG MENERIMA KUNJUNGAN DARI KANWIL DJPB PROVINSI LAMPUNG



Bandar Lampung – Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menerima kunjungan dari Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung di ruang rapat lantai dua gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Kunjungan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, beserta jajarannya dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Yusnadewi, Kepala Sekretariat Perwakilan, Dayan Alghiffari, Kepala Subauditorat I, Yayon Hudiantoro, Kepala Subauditorat II, Andanu, dan Kepala Subbagian Humas dan TU, Teguh Srihasto. Kunjungan DJPb ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait tugas dan fungsi DJPb kepada instansi vertikal di Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung menyampaikan harapannya agar koordinasi ini dapat terjaga dengan baik karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK tidak terlepas dari peran DJPb dalam hal monitoring atas pengelolaan dan realisasi anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

## BPK BERBAGI: PEMBERIAN SANTUNAN OLEH MASJID BAITUL HASIB BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung – Pada hari Senin 17 April 2023, Masjid Baitul Hasib BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengadakan kegiatan “BPK Berbagi” dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di daerah sekitar kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan putra putri dari Cleaning Service serta Tenaga Tidak Tetap yang bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1444 H. Kegiatan dibuka dengan kajian Tausiyah rutin setelah melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Yusnadewi.



Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Dayan Alghiffari, dan Kepala Subauditorat I BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Yayon Hudiantoro, serta dihadiri oleh pejabat struktural, fungsional, serta pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Acara dilanjutkan dengan doa dan foto bersama.



# Pojok Kuliner LAMPUNG

## Pindang Seruit



Nama seruit berasal dari kata 'nyeruit' yang artinya dilakukan bersama-sama. Hal ini menggambarkan masyarakat Lampung yang memiliki nilai kebersamaan tinggi. Lampung memiliki dua masyarakat adat, yaitu Lampung Sai Batin dan Lampung Pepadun. Bagi masyarakat Lampung Pepadun, seruit adalah makanan pokok.

## Bakso Sony



Bakso Sony adalah salah satu bakso legendaris di Provinsi Lampung. Cita rasa daging yang khas dari bakso Sony dan kuahnya yang gurih menjadikan bakso satu ini salah satu ikon kuliner Lampung yang hits.

## Mie Khodon



Mie Khodon sendiri merupakan sajian mie dengan diameter tebal, yang kurang lebih mirip dengan bakmie Jawa. Namun tentu ia mempunyai keistimewaan yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah bahan baku mie basahnya diolah sendiri, tanpa pengawet buatan.

## Jumbo Seafood



Nama resto ini memang bertema kakap, tapi kuliner yang disajikan di sini beraneka ragam, seperti ikan laut segar dan ikan tawar. Pengunjung juga bisa merasakan makanan Chinese dan juga tradisional.

# Galeri Foto Kegiatan



Masjid Baitul Hasib BPK Lampung :  
Kajian Tafsir Quran Surah Al-Kautsar



Melaksanakan Upacara Hari Lahir  
Pancasila 1 Juni 2023



Penyerahan Bantuan ke Panti Asuhan  
oleh DWP BPK Perwakilan Provinsi  
Lampung

Menerima Kunjungan Kerja dari  
Sekretariat DPD RI Provinsi Lampung





# Selamat Idul Adha 1444 H



## Tim Redaksi

**EDITOR**  
Desesri Ralifia

**PENANGGUNG JAWAB**  
Yusnadewi

**PENGARAH TEKNIS**  
Dayan Alghiffari

**REDAKTUR**  
Teguh Srihasto

**LAYOUT DAN DESIGN**  
T. Ryano Aditya



**FOTOGRAFER**  
Topan Santoso &  
Andreas Damanik



## BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

### PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jalan Pangeran Emir M.Noor No. 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan  
Bandar Lampung 35215 Telp. (0721) 474828 Hotline 081369694488  
<https://lampung.bpk.go.id>